



**RELASI KUASA DALAM TAFSIR
ANALISIS TAFSIR TEMATIK MODERASI BERAGAMA
KEMENTERIAN AGAMA
(PENDEKATAN SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW)**

Akhmad Nizaruddin (STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta, Indonesia)

akhmadnizaruddin@alhikmah.ac.id

Keywords

*Religious Moderation,
Power Relations,
Thematic Tafsir*

ABSTRACT

The paradigm shift in the composition of Qur'anic exegesis from individual works to collective or institutional efforts, along with the involvement of the Ministry of Religious Affairs in publishing exegetical works, indicates the presence of power relations in the production of tafsir. Qur'anic interpretation cannot be separated from the worldview of the exegete, which means the style and ideology of a tafsir are heavily influenced by the interpreter and their understanding of the surrounding socio-political realities. The theme of religious moderation in the Thematic Qur'anic Exegesis represents the manifestation of implementing the government's programs and mission by the Ministry of Religious Affairs as an institution responsible for religious development. This study employs the Systematic Literature Review (SLR) method, with the research objects being articles indexed in Google Scholar, selecting literature from scientific publications in journals using the keywords "religious moderation, thematic tafsir, power relations." The result of this research is the identification of twenty-one journal articles that focus on the issue of power relations in the Ministry of Religious Affairs' tafsir.

Kata Kunci:

Moderasi Beragama,
Relasi Kuasa, Tafsir
Tematik

ABSTRAK

Perubahan paradigma penyusunan tafsir dari karya individual menjadi karya kolektif atau instansi, keterlibatan Kementerian Agama dalam menerbitkan karya tafsir mengindikasikan adanya relasi kuasa dalam produk tafsir, penafsiran Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari pandangan dunia penafsir, sehingga corak dan

ideologi tafsir sangat dipengaruhi oleh penafsir dan pemahamannya terhadap realitas sosial politik yang melingkupinya. Tema moderasi beragama dalam Tafsir Alquran Tematik sebagai manifestasi menjalankan program dan misi Pemerintah oleh Kementerian Agama sebagai institusi yang membidangi pembangunan di bidang keagamaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan objek penelitian berupa artikel yang terindeks pada Google Scholar dengan memilih literatur dari publikasi ilmiah berupa jurnal dengan kata kunci pencarian "moderasi beragama, tafsir tematik, relasi kuasa". Adapun hasil penelitian ini adalah terdapat dua puluh satu jurnal penelitian yang memfokuskan permasalahan pada relasi kuasa tafsir Kementerian Agama.

A. PENDAHULUAN

Tafsir Alquran tidak hadir dalam ruang yang kosong, ia hadir pada sebuah ruang yang sudah terisi,¹ tak terkecuali tafsir yang diproduksi oleh Kementerian Agama yang diberi judul Tafsir Al-Qur'an Tematik. Dalam sejarah khazanah Islam, beribu judul tafsir al-Qur'an telah lahir dari tangan umat Islam sebagai wujud dari praktik penafsiran al-Qur'an yang mulai dari kitab *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an* karya Muhammad Ibn Jarir al-Thabari (w 310 H) hingga *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab yang lahir pada abad kini.²

Meminjam istilah Johanna Pink mayoritas karya-karya tersebut adalah bentuk tafsir yang paling konvensional yaitu *scholar's commentary* atau karya individual yang ditulis oleh seorang penulis tunggal sarjana keagamaan.³ Tetapi pada abad ke-20 telah menyaksikan perkembangan yang membawa beberapa konsekuensi bagi bidang tafsir Alquran, yaitu munculnya negara bangsa sebagai aktor keagamaan. Dalam konteks ini, sejak tahun 1970-an dan seterusnya, sebuah bentuk tafsir baru yang disebut sebagai "tafsir institusional" muncul. Tafsir jenis ini ditugaskan oleh institusi keagamaan yang dekat

¹ Menurut Amīn al-Khūlī, ilmu pengetahuan, konteks sosial-politik, dan aktivitas penafsir merupakan salah satu unsur yang akan mewarnai dan memengaruhi praktik penafsiran Al-Qur'an. Pandangan ini mengarahkan pada satu pemahaman konseptual bahwa penafsiran atau pemahaman secara umum, tidak bisa dilepaskan dari basis sosial-politik, asal-usul, serta genealogi keilmuan penafsir. Lihat: Amīn al-Khūlī, *Manāhīj at-Tajdīd fī an-Naḥwī wa al-Balāghah wa at-Tafsīr wa al-Adab* (t.k.: Dār al-Ma'rifah, 1961), hlm. 296-297. Pandangan semacam ini sejalan dengan yang dikemukakan Karl Mannheim, perintis sosiologi pengetahuan, dalam buku *Ideology and Utopia: an Introduction to the Sociology of Knowledge*. Mannheim menjelaskan bahwa pengetahuan manusia tidak bisa lepas dari subjektivitas individu yang mengetahuinya. Pengetahuan dan eksistensi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Latar belakang sosial dan psikologis subjek yang mengetahui tidak bisa dilepaskan dari proses terjadinya pengetahuan., lihat Karl Mannheim, Ideology and Utopia, an Introduction to the Sociology of Knowledge (London: Routledge & Kegan Paul Ltd. 39, t.th).

² Islah Gusmian, *Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, (IAIN Surakarta: Al-A'raf, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 2015), Vol.xxi, No.2, h.2 <https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i2.1173>

³ Johanna Pink. "Tradition, Authority, and Innovation in Contemporary Sunni Tafsir: Towards a Typology of Qur'an Commentaries from the Arab World, Indonesia and Turkey" dalam Journal of Qur'anic Studies, Vol. 12 (2010), 5961. Selain itu terbit pula karya-karya kolektif tafsir di UAE tafsir tematik surah-surah Alquran, *at Tafsir al Maudhu'I li suwar Alquran* pada tahun 2010, dan pada tahun 2019 *Mausuah Tafsir Maudhui* . Lihat: Markaz Tafsir li ad Dirasat al Quraniyyah, *Mausuah at Tafsir al Maudhu'I li al Qur'an al Karim*, (Riyadh: 2019)

dengan negara atau bagian dari negara, ditulis oleh sebuah tim cendekiawan -biasanya para ulama- dan diseragamkan struktur dan gayanya.⁴

Perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terhadap tafsir Alquran memiliki sejarah yang panjang. Pertama kali Kementerian Agama RI berhasil menyusun kitab tafsir yaitu pada tahun 1975. Meskipun kitab tafsir pertama tersebut hanya baru satu jilid yang memuat juz 1 hingga juz 3, yang kemudian tahun berikutnya muncul jilid-jilid selanjutnya secara bertahap dan disempurnakan.⁵

Tafsir Kementerian Agama juga merupakan bagian dari produk rencana pembangunan pada era Soeharto. Pada tahun 1980, Kemenag berhasil mencetak kitab tafsir secara sempurna 30 juz, meski dengan format dan kualitas yang masih sederhana. Kemudian, pada tahun 1990 kitab tafsir tersebut kemudian diperbaiki dan direvisi oleh badan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an – Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektor Keagamaan secara lebih luas dan diterbitkan beberapa kali oleh pemerintah maupun kalangan swasta serta mendapat respon cukup baik dari masyarakat.⁶

Kemudian seiring penyempurnaan Al-Qur'an dan tafsirnya, sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah melalui Kementerian Agama selalu berusaha untuk menyajikan tafsir yang lebih praktis dan sesuai dengan konteks dan realitas zaman di Indonesia, masyarakat memerlukan adanya tafsir yang lebih praktis. Sebuah tafsir yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban atas berbagai problematika umat. Oleh karena itu, tafsir Kementerian Agama RI ini hadir dengan pendekatan tematik.

Sejak tahun 2008 hingga 2022, Kementerian Agama melalui Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran (LPMQ) telah menulis 26 volume produk tafsir tematik. Produk Tafsir Al-Qur'an Tematik 4 seri pertama yang mulai diterbitkan sejak tahun 2008 - 2012 antara lain membahas tentang relasi umat beragama, pemberdayaan kaum lemah, keluarga sakinah, hari kiamat, pendidikan dan SDM, hukum dan HAM, ekonomi keumatan, peran dan kedudukan perempuan, etika dalam hidup bermasyarakat dan berkeluarga, lingkungan hidup, kesehatan, serta ketenagakerjaan. Sedangkan pada produk tafsir tematik seri kedua yang diterbitkan sejak 2013 terdiri dari 12 volume dengan mengangkat topik antara lain tentang pluralisme, tanggung jawab sosial, informasi dan komunikasi, generasi milenial, kenegaraan, jihad, moderasi Islam, dan moderasi beragama yang terbit pada tahun 2022.⁷

Istilah moderasi akhir-akhir ini banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Persoalan moderasi bukan sekedar urusan dan kepentingan orang per orang, melainkan juga urusan dan kepentingan setiap kelompok atau umat, kepentingan negara, dan masyarakat.⁸ Dalam hal moderasi beragama⁹, Alquran telah menegaskan kepada kita dengan adanya ayat-

⁴ Ibid

⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Alquran, *Mukadimah Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), xxv.

⁶ Ibid, xxvii

⁷ <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/>

⁸ Shihab, M. Quraish, Wasathiyah: *Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2020), x.

⁹ Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Istilah moderasi beragama muncul sejak dua dekade belakangan ini dikarenakan dunia Islam mendapatkan tuduhan dalam setiap kasus kekerasan, di mana dalam masyarakat Internasional disebut dengan wasathiyah. Namun demikian. Istilah moderasi beragama mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2019. Lihat:

ayat yang bersinggungan baik secara langsung mau pun tidak langsung dengan pembahasan moderasi beragama.¹⁰

Moderasi adalah sebuah upaya yang menghendaki sebuah kehidupan yang aman dan damai dalam sebuah masyarakat yang beragam, tanpa adanya tindakan-tindakan kekerasan atau pemaksaan antara satu dengan yang lain, karena para anggota masyarakatnya memiliki kesadaran untuk saling memahami dan menghargai satu dengan yang lain.

Indonesia merupakan negara yang memiliki bermacam-macam suku, agama, kepercayaan, budaya, kelas sosial-ekonomi dan sebagainya. Maka konsekuensinya Indonesia memiliki problematika yang sangat kompleks. Satu dekade terakhir ini, bangsa Indonesia diramaikan dengan wacana munculnya fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Gerakan fundamentalisme dan radikalisme dapat direorientasikan dengan munculnya gerakan formalisasi syariat Islam yang dipelopori Front Pembela Islam (FPI)¹¹, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)^{12 13}. Situasi dan latar belakang sosial peristiwa di kawasan ini memang spesifik baik dalam konteks dalam negeri maupun luar negeri, tetapi hal itu secara objektif dapat dilihat kaitannya dengan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Meskipun faktor sosial-kemasyarakatan dan ekonomi turut berperan dalam munculnya gerakan-gerakan radikal ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman agama merupakan salah satu penyebab utamanya. Mereka menggunakan teks-teks keagamaan sebagai legitimasi bagi tindakan mereka. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa faktor-faktor yang memunculkan gerakan-gerakan tersebut adalah kesalahan atas interpretasi agama.¹⁴ Kesalahan ini kemudian diperluas dengan berbagai bentuk dan cara, sehingga memunculkan fragmen-fragmen dalam masyarakat.

Kampanye Islam moderat juga dilakukan pemerintah melalui media tafsir al-Qur'an. Melalui tafsir ini, pemerintah tampaknya ingin melawan wacana formalisasi Islam. Sebagaimana disinggung di atas, wacana formalisasi Islam ini dianggap berakar dari penafsiran yang keliru terhadap al-Qur'an dan Sunnah. Jika diperhatikan, beberapa tema yang dipilih oleh Kemenag dapat diindikasikan sebagai bentuk respon pemerintah terhadap permasalahan tersebut. Sebut saja tema Hubungan Antar-Umat Beragama, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, Al-Qur'an dan Kenegaraan, Jihad; Makna dan Implementasinya, dan tentunya Moderasi Islam. Oleh karenanya, cukup masuk akal apabila

https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_13-04-2023_6437ba3889fa4.pdf, Awadin, A. P., dan D. Witro. *Tafsir Tematik Moderasi Islam: Jalan Menuju Moderasi Beragama Di Indonesia*, Jurnal Bimas Islam, vol. 16, no. 1, July 2023, pp. 171-00, doi:10.37302/jbi.v16i1.864.

¹⁰ Munandar, S. A., and S. Amin. "Contemporary Interpretation Of Religious Moderation In The Qur'an: Thought Analysis Quraish Shihab And Its Relevance In The Indonesian Context". *QiST: Journal of Quran and Tafsir Studies*, vol. 2, no. 3, Aug. 2023, pp. 290-09, doi:10.23917/qist.v2i3.1448.

¹¹ Pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI melalui SKB yang ditandatangan 30 Desember 2020i <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi>

¹² HTI dibubarkan dengan dicabut status hukumnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah?page=all>

¹³ Haedar Nashir, *Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Ideologis*, (Jakarta: PSAP. 1993), 272

¹⁴ Mohammad Atho Mudzhar, *Islam in a Globalized World: The Challenges of Human Rights, Law, and Interfaith Harmony* (Jakarta: Badang Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2011), 79-87.

pemerintah menerbitkan tafsir untuk melawan wacana tersebut, yang dalam hal ini melalui penerbitan Tafsir Alquran Tematik.¹⁵

Keterlibatan Pemerintah dalam penyusunan kitab Tafsir Al-Qur'an Tematik menimbulkan problematika dan memunculkan beragam pertanyaan terkait dengan berbagai kepentingan. Keterlibatan tersebut mengindikasikan adanya relasi kuasa pemerintah terhadap kitab tafsir tersebut.

Praktik penafsiran dalam rangka membangun peradaban dan perkembangan telah merasuk pada sebuah institusi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Idealnya, perkembangan produk penafsiran adalah murni untuk kepentingan peradaban, keilmuan dan kehidupan masyarakat. Namun, karena sebuah produk tafsir tidak lahir dalam ruang yang kosong, maka perlu untuk menelusuri lebih lanjut, terutama produk tafsir yang disusun oleh instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan tim penyusun yang penuh akan kepentingan.¹⁶

Keterlibatan Pemerintah -meminjam istilah Foucault- adalah relasi kuasa pengetahuan melalui wacana yang terkadang tidak disadari telah mendominasi, menghegemoni, mengontrol dan mengarahkan perilaku setiap individu.¹⁷ Asumsinya, adanya keterlibatan Pemerintah RI dalam fenomena tersebut tentu dapat menimbulkan beberapa pertanyaan dan permasalahan. Pertama, tentang penyusunan kitab Tafsir Al-Qur'an Tematik yang di dalamnya berpraktik beragam relasi dan kepentingan, antara subjek dan objek. Ada kepentingan apa Kementerian Agama RI memberikan rekomendasi kepada para mufassir untuk menyusun kitab tafsir tersebut secara kolektif?

Kedua, peran serta penulis tafsir dalam penyusunan kitab tafsir tersebut. Siapa saja penulis tafsir yang terlibat dalam tim penyusun? Dari kalangan dan kelompok mana saja para penulis tafsir? Setelah para mufassir Indonesia berhasil disatukan dalam sebuah tim penyusun kitab tafsir, bagaimana otoritas para mufassir dalam menafsirkan Alquran dan bagaimana pula produk tafsir yang dihasilkan?

Dinamika wacana tafsir memperlihatkan adanya dinamika hubungan antara produsen tafsir dengan pembaca tafsir, pembaca tafsir mengikuti mufassir sebab ia sangat sadar bahwa kapasitas keilmuan dan keahliannya, meskipun dalam tradisi beragama realitasnya tidak selalu demikian. Terhadap produk penafsiran mufassir tertentu, sebagian masyarakat muslim pembaca tafsir percaya dan bertindak sesuai dengan wacana tafsir yang telah ditulis,¹⁸ sedangkan sebagian masyarakat yang lain mungkin tidak mengikuti karena satu alasan.

¹⁵ Muhammad Izzul Haq Zain, Muhammad Imam Mutaqin, *Membela Sistem Nasional; Analisis Wacana Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* Kementerian Agama Republik Indonesia, Jurnal An-Nida, Vol 46, No 2 (2022), DOI: 10.24014/an-nida.v46i2.20862

¹⁶ Tafsir Al-Qur'an, dari sudut pandang sosial-budaya, hakikatnya tidaklah semata-mata merupakan hasil dari praktik memahami pesan Tuhan melalui teks-teks Al-Qur'an, tetapi pada saat yang bersamaan, ia juga menjadi arena bagi para penafsir untuk melakukan pembacaan terhadap realitas sosial-politik yang terjadi pada saat tafsir Al-Qur'an ditulis dan dipublikasikan. Asumsi yang dibangun di sini adalah bahwa para penulis tafsir Al-Qur'an selain melakukan praktik pemahaman atas pesan Tuhan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an, pada saat yang bersamaan mereka juga melakukan pembacaan dan berdialektika dengan problem-problem sosial-politik yang terjadi ketika praktik penafsiran dilakukan. Lihat: Islah Gusmian, *Tafsir Alquran dan Kekuasaan di Indonesia, Peneguhan, Kontestasi dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: Salwa, 2014), 7.

¹⁷ Foucault, M, *The History of Sexuality*, Vol. I: An Introduction. Terj. Robert Hurley. (New York: Vintage Books, 1990) 82-83.

¹⁸ Hal semacam ini juga telah digelisahkan oleh Abou El-Fadhl dengan maraknya otoritarianisme yang sangat parah dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Sebagian hukumnya adalah dia ambil dari hasil semua

Ada relasi antara mufassir dan pembaca tafsir. Di mana mufassir mengatasnamakan otoritas telah mengarahkan pemikiran para pembaca tafsir dengan berlindung dan bersembunyi dibalik produk tafsirnya, sedangkan di pihak yang lain yakni pembaca tafsir akan mengikuti suka rela terhadap apa yang telah ditafsirkan mufassir tersebut karena mereka menilainya sebagai pengetahuan ilmiah dan mengandung kebenaran, dan selanjutnya mereka akan menjelaskan wacana atau penafsiran tersebut di dalam perilaku sehari-hari mereka. Dalam hubungan seperti itulah maka kekuasaan telah memasuki ruang-ruang relasi sosial antara mufassir dan para pembaca tafsir dalam perwacanaan tafsir.

B. METODE

Penelitian ini memakai metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini merupakan metode dengan menganalisa hasil dari berbagai literatur yang telah dipilih sesuai dengan judul dan kesesuaian isi yang berkaitan dengan penelitian relasi kuasa dalam tafsir analisis tafsir tematik moderasi beragama Kementerian agama. Ada beberapa hal yang mendasari dilakukan penelitian ini yakni: Kementerian Agama R, telah terlibat aktif menerbitkan tafsir Alquran dan tafsir tematik sebagai bagian karya kolektif. 2. Keterlibatan Kementerian Agama dalam menerbitkan karya tafsir mengindikasikan adanya relasi kuasa dalam produk tafsir..

Beberapa hal tersebut memerlukan pertanyaan penelitian yang menentukan keperluan tema, berikut ini pertanyaan penelitian yang diperlukan dalam penelitian: 1. Bagaimana relasi kuasa yang terdapat dalam tafsir tematik moderasi beragama Kementerian Agama? 2. Bagaimana konstruksi Moderasi Beragama dalam Tafsir Tematik Kementerian agama?

Pada riset ini, artikel jurnal yang diteliti bersumber dari Google Scholar berjumlah 21 artikel. Artikel tersebut terbit dalam rentang waktu 2016-2023 (8 tahun terakhir). Kata kunci yang digunakan adalah “moderasi beragama, tafsir, dan relasi kuasa.

C. PEMBAHASAN

Dalam pencarian artikel peneliti membagi pencarian menjadi dua bagian, pertama dengan menggunakan kata kunci moderasi beragama, tafsir. Peneliti mendapatkan 12 artikel yang terkait dengan pertanyaan penelitian.

No	Penulis	Nama dan Link Jurnal	Judul
1	Naili Rosa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara https://doi.org/10.32495/nun.v8i2.412	Orientasi Penyusunan dan Wacana Kritis terhadap Tafsir Quran Tematik (TQT) Moderasi Beragama Kementerian Agama
2	Bayumi Nasrul Hoir	Bulletin of Islamic Research	Thematic Tafsir Study: Religious Moderation in

penafsiran atau produktafsiran. Lihat, M. Arfan Mu’ammar, Hermenutika Khaleed Abou El-Fadhl (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), h.158

	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	DOI:10.23917/bir.v1i1.12	the Qur'an
3	Ahmad Agus Salim Abdul Kadir Riyadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya	<i>Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara</i> https://doi.org/10.32495/nun.v8i1.345	Tawāṣūt, ‘Adālah, dan Tawāzun dalam Penafsiran Kementerian Agama Telaah Konsep Moderasi Beragama Negara
4	Firdaus M., Salistyia F., Romli M., & Arsyad M	<i>Reslaj : Jurnal Sosial Pendidikan Agama Laa Roiba ,</i> https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.798	Reinterpretasi Gagasan Moderasi Beragama Kacamata Al-Qur'an sebagai Upaya dalam Mewujudkan Kedamaian di Indonesia
5	Abdul Fattah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir DOI: https://doi.org/10.24090/maghza.v5i2.3125	Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Quran
6	Munandar, Siswoyo Aris, and Saifuddin Amin.	<i>QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies</i> vol. 2, No. 3 Agustus 2023, https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.1448.	<i>Contemporary Interpretation Of Religious Moderation In The Qur'an: Thought Analysis Quraish Shihab And Its Relevance In The Indonesian Context</i>
7	Fatihatusshofwa, M., MHF. Akbar, MH. Nashrullah, dan AA. Muhyi.	<i>Al Muhibidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir ,</i> doi:10.57163/almuhibidz.v3i2.78.	Perspektif Islam Tentang Moderasi Beragama: Analisis Tafsir Maudhu'i
8	Khairan M. Arif	Al Risalah 11, no. 1 (2020): 22–43. https://doi.org/10.34005/alri	Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif al-Qur'an, As-

		<u>salah.v11i1.592</u>	Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha
9	Naufal Cholily Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaaan DOI: https://doi.org/10.33650/mushaf.v3i2.6171	Moderation In Indonesian Tafsir: Critical Discourse Analysis Of The Terms Of Ummatan Wasatan In The Al-Qur'an Dan Terjemahannya By The Ministry Of Religion Of The Republic Of Indonesia
10	Muhammad Izzul Haq Zain, Muhamad Imam Mutaqin	An-Nida http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20862	Membela Sistem Nasional; Analisis Wacana Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik) Kementerian Agama Republik Indonesia
11	Muhammad Ulinnuha Mamluatun Nafisah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta	<i>SUHUF</i> , Vol. 13, no. 1, June 2020, doi:10.22548/shf.v13i1.519.	Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab Kajian atas Tafsir an-Nur, al-Azhar, dan al-Mishbah
12	Iffaty Zamimah,	Jurnal Al-Fanar 1, no. 1 (2018) https://doi.org/10.33511/alfanar.v1n1.75-90	Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaaan: Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab

Sedangkan ketika menggunakan kata kunci tafsir, relasi kuasa peneliti menemukan 9 artikel yang terkait, sebagai berikut:

No .	Penulis	Nama dan Link Jurnal	Judul
1	Suci Wulandari UIN Sunan Kalijaga	Jurnal Al-A'raf DOI: 10.22515/ajpif.v15i1.1210	Ideologi <i>Kancawingking</i> : Studi Relasi Kuasa Pengetahuan Dalam Tafsir Alhuda
2	Tinggal Purwanto	PALASTREN, Vol. 12, NO. 1, Juni 2019	Kesetaraan Gender Dan Relasi Kuasa Dalam

	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v12i1.5052	Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia
3	Heki Hartono UIN Sunan Kalijaga	digilib.uin-suka.ac.id	Relasi Kuasa Dalam Penafsiran Jihad Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI
4	Taryudi Taryudi, Tatan Setiawan UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Jurnal Iman dan Spiritualitas http://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11483	Tafsir dan Politik Kekuasaan di Indonesia
5	Nur Mahmudah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah	PALASTREN, Vol. 6, No. 2, Desember 2016 http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v6i2.993	Perempuan Dalam Relasi Kuasa Tafsir Al Qur'an: Telaah atas Corak Tafsir Ummu Salamah R.A
6	Akhmad Supriadi, M.S.I UIN Sunan Kalijaga	digilib.uin-suka.ac.id	Negara, Tafsir Dan Seksualitas Konstruksi Maskulinitas dan Relasi Kuasa dalam Tafsir al-Qur'an Tematik dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia
7	Arif Kurniawan UIN Sunan Kalijaga	Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir DOI: 10.1234/hermeneutik.v13i2.6335	Tinjauan Strategi Wacana Kuasa Pemerintah Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI
8	Bangkit Kurniadi	http://e-repository.perpus.uinsala	Relasi Tafsir Al-Quran Dan Politik (Studi

	Ansor UIN Salatiga	tiga.ac.id/id/eprint/11969	Komparasi Pemikiran Islah Gusmian Dan Mubasirun)
9	Moch. Mahrus,	Disertasi UIN Walisongo, Semarang 2021	Moderasi Beragama Dalam Kajian Tafsir Kementerian Agama Ri Tahun 2000

Kajian terkait tema terkait isu relasi kuasa, tafsir tematik Kementerian agama dan moderasi beragama dalam tafsir telah banyak dilakukan, namun pembahasan relasi kuasa dalam tafsir tematik moderasi beragama Kementerian Agama masih minim. Dalam kajian ini akan dipetakan pada beberapa jenis literatur yang terkait dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Pertama moderasi beragama dalam tafsir al-Qur'an, dan ketiga relasi kuasa dalam tafsir.

Tema tentang moderasi beragama dalam tafsir sudah banyak dikaji para peneliti. Khairan Muhammad Arif¹⁹ menyatakan konsep moderasi beragama menjadi arah atau aliran pemikiran Islam yang telah menjadi diskursus penting dalam dunia Islam dewasa ini, melihat kondisi umat Islam yang selalu menjadi tertuduh dalam setiap peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh personal muslim yang tidak memahami karakter dan inti ajaran Islam. Washathiyah bukanlah pemikiran Islam yang berorientasi budaya negeri-negeri tertentu, sekte-sekte tertentu, mazhab-mazhab tertentu, jama'ah-jamah tertentu ataupun karena zaman tertentu, namun moderasi beragama adalah hakikat ajaran Islam pertama kali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebelum dicemari oleh kotoran pemikiran, dicampuri oleh tambahan-tambahan bid'ah dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan pendapat dalam tubuh umat, diterpa oleh pandangan arah-arah dan sekte-sekte Islam dan diwarnai oleh ideologi-ideologi asing..

Fatihatusshofwa, M., MHF. Akbar, MH. Nashrullah, dan AA. Muhyi²⁰ dalam penelitian menunjukkan bahwa dalam sudut pandang Islam, moderasi dalam beragama berarti mendahulukan sikap toleran dalam perbedaan, keterbukaan dalam menerima keberagaman (inklusivisme), baik umat dalam aliran atau madzhab ataupun umat dalam beragama. Di Indonesia, eksistensi pemikiran moderat dalam beragama telah ada sejak lama. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya beberapa hal, yaitu, pertama, kesejahteraan masuknya Islam ke bumi Nusantara; kedua, selama sepanjang sejarah para ulama terkenal telah memberikan respon pada dinamika laju pemikiran yang terus berkembang hingga saat ini; ketiga, para tokoh Islam kian menghadapi konstruk sosial yang semakin dinamis yang menuntut mereka agar lebih berupaya membangun masyarakat dengan merespons berbagai modernitas yang selalu berkembang.

¹⁹ Muhammad Khairan Arif, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha," AlRisalah 11, no. 1 (2020): 22–43. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>

²⁰ Fatihatusshofwa, M., MHF. Akbar, MH. Nashrullah, dan AA. Muhyi. "Perspektif Islam Tentang Moderasi Beragama: Analisis Tafsir Maudhu'i". *Al Muhibidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, vol. 3, tidak. 2, September 2023, hlm.131-48, doi:10.57163/almuhibidz.v3i2.78.

Abdul Fattah²¹ menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an tentang moderasi Islam. Istilah yang dapat diandalkan terhadap kata moderat adalah Wasathan, yang mana dalam Al-Qur'an telah disebutkan kata wasath dan turunannya sebanyak lima kali dalam bentuk variasinya, dalam surat al-Adiyat (100): 5, al -Baqarah (2): 143 al-Maidah (5): 89, al-Qalam (68): 28 dan al-Baqarah (2): 238. Dengan menggunakan teori yang dirumuskan oleh Abd al-Hayyi al-Farmawy, penulis menyimpulkan bahwa Islam moderat dalam Al-Qur'an masuk dalam tiga hal, yaitu moderasi dalam aqidah, moderat dalam syariah, dan moderat dalam berperilaku.

Firdaus dkk²² dalam penelitiannya menggali gagasan moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an demi terciptanya perdamaian di Indonesia. Kajian ini hanya memaparkan gagasan moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an melalui kajian tematik saja. Kemudian, penelitian ini merekomendasikan agar kedepannya pemahaman yang lebih mutakhir mengenai gagasan moderasi beragama dapat dihasilkan melalui kajian atau tahlili yang komprehensif dengan mengacu pada literatur tafsir Al-Qur'an pada khususnya.

Beberapa peneliti melakukan penelitian tentang moderasi beragama menurut beberapa penafsir Indonesia. Iffaty Zamimah²³ dan Siswoyo Aris Munandar dan Saifuddin Amin²⁴ melalui penelitian tentang moderasi beragama menurut Quraish Shihab menyatakan bahwa karakter moderasi beragama menurut Quraish Shihab menggambarkan sifat moderat yang dimiliki oleh umat Islam, yakni tidak condong ke arah berlebih-lebihan (*ifrâth*) ataupun meremehkan (*tafrîth*). Muhammad Ulinnuha dan Mamluatun Nafisah²⁵ meneliti moderasi beragama pada Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka dan Quraish Shihab menyimpulkan bahwa konsepsi Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab tentang dimensi moderasi beragama yang dilengkapi dengan indikator-indikatornya, yakni moderasi pada aspek teologi, pada aspek ibadah, pada aspek hubungan (*mu'amalah*), pada aspek hukum, pada aspek penciptaan manusia dan alam semesta, serta pada aspek yang bersifat moderat. pemerintahan dan kuliner. Ketujuh dimensi moderasi ini sangat relevan dengan konteks masyarakat Indonesia yang maritim, plural, heterogen, serta multietnis, bahasa, dan agama.

Sementara Jamarudin et al²⁶ dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman moderasi beragama secara mindset tepat jika disandingkan dengan pengamalan sikap *tawazun* (seimbang) atau *tawasshuth* (menengah) dengan pemahaman yang benar melalui pengamalan pesan-pesan Al-Qur'an.

²¹ Fattah, A. "Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Quran". *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, vol. 5, no. 2, Desember 2020, hlm.156-72, doi:10.24090/maghza.v5i2.3125.

²² FirdausM., SalistyA., RomliM., and ArsyadM. "Reinterpretasi Gagasan Moderasi Beragama Kacamata Al-Qur'an Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Kedamaian Di Indonesia". *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 4, no. 2, Dec. 2021, pp. 359-6, doi:10.47467/reslaj.v4i2.798.

²³ Iffaty Zamimah, "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaaan: Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab," *Jurnal Al-Fanar* 1, no. 1 (2018): 75–90 <https://doi.org/10.33511/alfanar.v1n1.75-90>

²⁴ Munandar, Siswoyo Aris, and Saifuddin Amin. "Contemporary Interpretation Of Religious Moderation In The Qur'an: Thought Analysis Quraish Shihab And Its Relevance In The Indonesian Context". *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* vol. 2, No. 3 Agustus 2023, hlm. 290-09. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.1448>.

²⁵ Ulinnuha, M., and M. Nafisah. "MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF HASBI ASH-SHIDDIEQY, HAMKA, DAN QURAISH SHIHAB". *SUHUF*, Vol. 13, no. 1, June 2020, pp. 55-76, doi:10.22548/shf.v13i1.519.

²⁶ Jamarudin, Ade, Miftah Ulya, Rois Abdul Fatah, and Wage Wage. "Implementing Religious Moderation Using the Perspective of the Qur'an". *KnE Social Sciences*, Vol. 7, No. 8, April 2022, 579-90. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i8.10776>

Tafsir Kementerian Agama juga menjadi penelitian beberapa orang peneliti terkait tema moderasi beragama, seperti Naili Rosa²⁷, Ahmad Agus Salim dan Abdul Kadir Riyadi²⁸, Naufal Choily²⁹ Muhammad Izzul Haq Zain dan Muhammad Imam Mutaqin³⁰. Rosa berdasarkan temuannya, menyatakan tafsir ini menggunakan metode tafsir mauḍū‘ dan ditulis dengan gaya adabi ijtimā‘i (masyarakat sosial). Penafsiran ini gagal melihat unsur kebahasaan yang membentuk tema moderasi. Hal ini terjadi karena padatnya lokalisasi isi tafsir sehingga mengaburkan keberadaan *Asbāb al-Nuzūl* dalam ayat-ayat terkait. Berkembangnya penafsiran tersebut tidak terlepas dari maksud dan tujuan lembaga tersebut sebagai respon terhadap terus meluasnya radikalisme di Indonesia.

Agus Salim dan Abdul Kadir dalam penelitiannya mendapati Pertama, jika dilihat dari wacana moderasi beragama, baik penafsiran Kementerian Agama *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang Disempurnakan* (2011) dan *Tafsir Tematik: Moderasi Islam* (2022). maupun dua karya terbarunya *Moderasi Beragama dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* menunjukkan adanya wacana yang berkesinambungan. Definisi dan makna istilah-istilah kunci yang telah dijelaskan seperti tawāṣuṭ, ‘adālah, dan tawāzun tidak menunjukkan banyak perbedaan di antara karya-karya tersebut. Kedua, jika dilihat dari wacana moderasi beragama ditinjau dari negara, antara tafsir Kementerian Agama dengan kedua buku yang dimaksud terdapat sejumlah perbedaan.

Sedangkan Muhammad Izzul Haq Zain dan Muhammad Imam Mutaqin dalam penelitiannya menemukan bahwa tafsir moderasi Islam lahir dalam konteks kebangkitan kelompok-kelompok radikal yang berupaya melakukan formalisasi Islam dengan cara yang ekstrim. Pemerintah yang terganggu dengan kondisi tersebut berusaha untuk melawan gerakan tersebut melalui berbagai kebijakan termasuk penerbitan tafsir. Melalui tafsir Moderasi Islam ini, selain ditujukan untuk memberikan rujukan yang ‘benar’ untuk umat Islam, terdapat pula sisi-sisi pembelaan terhadap pemerintah, khususnya pada aspek yang sering dipermasalahkan oleh kelompok-kelompok radikal, diantaranya adalah sistem demokrasi, dasar hukum dan ideologi negara, dan juga bentuk negara. Tersisipnya aspek pembelaan tersebut menunjukkan produksi tafsir tidak dapat dilepaskan bias penulis dan dari konteks yang mengitarinya. Dalam hal ini, tafsir moderasi Islam yang diterbitkan pemerintah tak hanya merespon konteks yang ada, tetapi juga menyisipkan hal-hal yang sejalan dengan kepentingan mereka.

²⁷ Naili Rosa, “Orientasi Penyusunan dan Wacara Kritis terhadap Tafsir Qur'an Tematik (TQT) Moderasi Beragama Kementerian Agama”, *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara* DOI: 10.32495/nun.v8i2.412 Vol. 8 No. 2 (2022)

²⁸ Salim, AA, dan AK Riyadi. “Tawāṣuṭ, ‘Adālah, Dan Tawāzun Dalam Penafsiran Kementerian Agama: Telaah Konsep Moderasi Beragama Negara”. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* , vol. 8, no. 1 Mei 2022, hlm. 45-72, doi:10.32495/nun.v8i1.345.

²⁹ Cholily, N, “Moderation In Indonesian Tafsir: Critical Discourse Analysis Of The Terms Of Ummatan Wasatan In The Al-Qur'an Dan Terjemahannya By The Ministry Of Religion Of The Republic Of Indonesia”, *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* Vol.3, No.2(June2023)Page:01-17, doi:10.33650/mushaf.v3i2.6171

³⁰ Muhammad Izzul Haq Zain dan Muhammad Imam Mutaqin “Membela Sistem Nasional; Analisis Wacana Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik) Kementerian Agama Republik Indonesia” An-Nida' Vol 46, No 2 (2022), <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20862>

Penelitian lain tentang moderasi beragama dalam Alquran juga dilakukan Andri Sutrisno et al³¹, dan Adi Pratama Awadin dan Doli Witro³² yang menunjukkan moderasi beragama adalah sikap beragama moderat di antara dua kutub ekstrim yaitu kanan dan kiri yang tercermin dari tujuh karakter utama yakni menghargai berbagai perbedaan, mengetahui amalan utama, tidak memiliki sifat fanatik berlebihan, menjalankan agama secara mudah, tidak memahami teks keagamaan secara tekstual saja, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, dan konsisten dalam beragama.

Keterkaitan antara negara, politik dan al-Qur'an dibahas oleh Ulya³³. Ulya menemukan fakta bahwa pemaknaan dan penafsiran kata "Ulu al-Amr" dalam Tafsir al-Azhar memiliki makna "penguasa" atau "pemimpin" yang harus lahir dari satu kelompok dengan yang memilihnya (insider) atau harus dari kalangan muslim sendiri. Hamka sebagai seorang mufasir sekaligus seorang anggota konstituante dari Masyumi meneguhkan penafsirannya tentang wacana teologis *Ulu al-Amr* dalam QS. an-Nisa [4]:59 dengan membuat suatu penafsiran yang mengarahkan suara muslim pada masa itu agar memilih partai-partai Islam.

Suci Wulandari³⁴ dalam penelitiannya tentang relasi kuasa dalam tafsir Al Huda menunjukkan bahwa penafsiran ayat-ayat tentang perempuan yang dilakukan oleh Bakri Syahid dalam tafsir Alhuda ada pengaruh ideologi Jawa, yang memposisikan perempuan sebagai kanca wingking atau pelengkap di belakang suami, serta kuasa yang 'terselip', yakni pengukuhan terhadap posisi perempuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sekaligus meneguhkan bahwa sebuah produk tafsir tidak dapat sepenuhnya lepas dari kepentingan penafsirnya, bahkan dapat menjadi "cermin" kepentingan politik pemerintah di masanya.

Taryudi dan Setiawan³⁵ secara khusu menyoroti bahwa corak perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia di tengah politik kekuasaan yang mengitarinya menunjukkan bahwa pemikiran yang berkembang dipengaruhi oleh corak *Adab Ijtimā'i* (etika sosial). Melalui teori Foucault tampak adanya relasi antara kekuasaan (power) yang dalam konteks ini terepresentasi dalam periodesasi politik kekuasaan pada tiga era kekuasaan di Indonesia masa kemerdekaan yakni: era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi dan pengetahuan yang terwakili dalam produk pemikiran tafsir para mufasirnya yang disesuaikan dengan era politik kekuasaannya.

Penelitian tesis dan disertasi tentang relasi kuasa dalam tafsir kementerian agama juga dilakukan oleh beberapa peneliti. Tinggal Purwanto³⁶ dalam disertasinya menjelaskan

³¹ Sutrisno, A., M. R. Haqiqi, B. M. Roza, and M. M. Dalail. "Qur'anic Insights On Religious Moderation And Its Relevance To Religious Harmony In Indonesia". *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, vol. 2, no. 1, Feb. 2023, pp. 102-15, doi:10.23917/qist.v2i1.1470.

³² Awadin, A. P., and D. Witro. *Tafsir Tematik Moderasi Islam: Jalan Menuju Moderasi Beragama Di Indonesia*, Jurnal Bimas Islam, vol. 16, no. 1, July 2023, pp. 171-00, doi:10.37302/jbi.v16i1.864.

³³ Ulya, Hubungan Kekuasaan – Pengetahuan dalam Pewacanaan Ulu al-Amr QS an-Nisa [4]:59 pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955-1966 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 330-339

³⁴ Suci Wulandari, "IDEOLOGI 'KANCA WINGKING': STUDI RELASI KUASA PENGETAHUAN DALAM TAFSIR ALHUDA," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 15, no. 1 (June 30, 2018): 101, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1210>.

³⁵ Taryudi Taryudi and Tatan Setiawan, "Tafsir dan Politik Kekuasaan di Indonesia". *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 1, No 1, 2021, pp. 63-70 <http://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11483>

³⁶ Purwanto, Tinggal, *Kesetaraan Gender Dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jurnal PALASTREN, Vol. 12, No. 1, Juni 2019, 30-63

bagaimana relasi kuasa pengetahuan beroperasi dalam Tafsir Alquran Tematik, khususnya dalam mengkonstruksi kesetaraan gender. Kajian penelitian ini menemukan bahwa relasi kuasa-pengetahuan mengalir dalam kitab tafsir tersebut. Mufassir tidak hanya berupaya menjelaskan kitab Alquran semata, tetapi juga berupaya mengkonstruksi kehidupan umat agar sejalan dengan agenda Pemerintah. Mufassir berupaya mengkonstruksi hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi konstruksi tersebut tidak sepenuhnya obyektif dan netral karena masih menyisakan efek diskriminatif yang lebih memprioritaskan kaum laki-laki di wilayah publik dan kaum perempuan di wilayah domestik. Relasi kuasa-pengetahuan ini beroperasi secara sistematis dengan mengontrol hubungan kekuasaan dengan kebenaran sehingga melahirkan konstruksi kesetaraan yang lebih diarahkan untuk mengatur kehidupan umat atas nama peningkatan produktivitas.

Kurniawan³⁷ menyatakan strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan memposisikan Tafsir Alquran Tematik Kementerian Agama sebagai produk ilmu pengetahuan, sedangkan tim interpretasinya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah yang berkuasa. Tentu saja hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan ini memerlukan pengaruh intervensi yang merata. Sebagaimana relasi kekuasaan yang didefinisikan oleh Michel Foucault bahwa relasi kekuasaan sebagai sesuatu yang membuat orang patuh. Relasi kekuasaan merupakan konsep relasi kekuasaan, dimana praktik kekuasaan berasal dari subjek pada objek melalui berbagai media. Strategi tersebut disampaikan melalui media agama, kenegaraan, budaya, gender yang keempatnya dikemas dalam tafsir Al-Qur'an tematik.

Heki Hartono³⁸ dalam penelitiannya menemukan relasi kuasa pengetahuan mengalir dalam proses produksi, produsen tafsir dan produk tafsir. Dalam proses produksi, relasi kuasa beroperasi secara dialektif dan produktif melalui inisiasi, elektasi, akomodasi, kontestasi, kontroversi, negosiasi dan kompromi dari para mufassir dalam menyusun kitab tafsir tersebut. Produsen tafsir hanya berupaya mengkonstruksi kehidupan umat agar sejalan dengan agenda Pemerintah. Dalam produk tafsir, mufassir memang berupaya mengkonstruksi jihad yang benar, akan tetapi konstruksi tersebut tidak sepenuhnya netral dan berjalan baik, karena masih menyisakan diskriminatif dan kecolongan. Relasi kuasa-pengetahuan ini beroperasi secara sistematis dengan mengontrol hubungan kekuasaan dengan kebenaran sehingga melahirkan konstruksi jihad yang lebih diarahkan pada jihad yang tidak ekstrim dan keras dan lebih diarahkan untuk mengatur kehidupan umat atas nama peningkatan produktivitas.

Akhmad Supriadi³⁹ dalam penemuan penelitian disertasinya menyatakan pengembangan teori maskulinitas hegemonik yang disebut dengan maskulinitas patriarkis lunak (*mild patriarchic masculinity*) yaitu sebuah model maskulinitas patriarkis yang merepresentasikan hegemoni maskulinitas yang bersifat hierarkis-patriarkis dalam wacana yang dominan pada Tafsir Tematik dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama, namun pada beberapa isu merepresentasikan kesetaraan antara maskulinitas dan femininitas. Juga

³⁷ Kurniawan, Arif. "Tinjauan Strategi Wacana Kuasa Pemerintah dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI." *HERMENEUTIK* [Online], 13.2 (2019): 35-63. DOI: [10.21043/hermeneutik.v13i2.6353](https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v13i2.6353)

³⁸ Heki Hartono, "Relasi Kuasa Dalam Penafsiran Jihad Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019)

³⁹ Akhmad Supriadi, Disertasi Negara, *Tafsir Dan Seksualitas Konstruksi Maskulinitas dan Relasi Kuasa dalam Tafsir al-Qur'an Tematik dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022)..

ditemukan ditemukan bahwa proses penyusunan dan tim penulis Tafsir al-Qur'an Tematik (TAT) dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama didominasi oleh rezim gender laki-laki (maskulin), yang membawa *regime of truth* tersendiri antara lain: hegemoni maskulinitas, ortodoksi Sunni serta rezim heteronormativitas.

Moch. Mahrus⁴⁰ dalam disertasinya *Moderasi Beragama Dalam Kajian Tafsir Kementerian Agama Ri Tahun 2000*, temuan dalam penelitian ini adalah Konstruksi Moderasi Beragama dalam Tafsir Kementerian agama 2000, ada tiga, yakni: Sumber interpretasi, Metode interpretasi, dan validitas interpretatif. Dan alasan Moderasi Beragama menjadi Isu penting dalam Tafsir Kementerian agama, yaitu sebagai: Media Agama, Media Negara, Media Sosial, Media Budaya, Media Gender, dan Media Etnik. Implikasi dari gagasan moderasi beragama yang diusung oleh Tafsir Kementerian agama, terdapat tujuh nilai, mengambil jalan Tengah, berkeseimbangan, adil, toleransi, egaliter, musyawarah dan reformasi.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian sistematik terhadap literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa bahasan tentang relasi kuasa pada tafsir tematik Kementerian Agama, dalam sejumlah studi, telah banyak dilakukan. Dari sejumlah bahasan tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara rinci membahas relasi kuasa pada tafsir temati Kementerian Agama dalam tema moderasi beragama.

DAFTAR PUSTAKA

⁴⁰ Moch. Mahrus, *Moderasi Beragama Dalam Kajian Tafsir Kementerian Agama Ri Tahun 2000*, (Semarang: UIN Walisongo, 2021)

Akhmad Supriadi, Disertasi Negara, *Tafsir Dan Seksualitas Konstruksi Maskulinitas dan Relasi Kuasa dalam Tafsir al-Qur'an Tematik dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022)..

Amīn al-Khūlī, *Manāhīj at-Tajdīd fī an-Naḥwi wa al-Balāghah wa at-Tafsīr wa al-Adab* (t.k.: Dār al-Ma'rifah, 1961).

Awadin, A. P., and D. Witro. *Tafsir Tematik Moderasi Islam: Jalan Menuju Moderasi Beragama Di Indonesia*, Jurnal Bimas Islam, vol. 16, no. 1, July 2023, pp. 171-00, doi:10.37302/jbi.v16i1.864.

Cholily, N, "Moderation In Indonesian Tafsir: Critical Discourse Analysis Of The Terms Of Ummatan Wasatan In The Al-Qur'an Dan Terjemahannya By The Ministry Of Religion Of The Republic Of Indonesia", *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan Vol.3, No.2(June2023)Page:01-17*, doi:10.33650/mushaf.v3i2.6171

Fatihatusshofwa, M., MHF. Akbar, MH. Nashrullah, dan AA. Muhyi. "Perspektif Islam Tentang Moderasi Beragama: Analisis Tafsir Maudhu'i". *Al Muhibidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, vol. 3, tidak. 2, September 2023, hlm.131-48, doi:10.57163/almuhibidz.v3i2.78.

Fattah, A. "Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Quran". *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, vol. 5, no. 2, Desember 2020, hlm.156-72, doi:10.24090/maghza.v5i2.3125.

FirdausM., Salistyaf., RomliM., and ArsyadM. "Reinterpretasi Gagasan Moderasi Beragama Kacamata Al-Qur'an Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Kedamaian Di Indonesia". *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 4, no. 2, Dec. 2021, pp. 359-6, doi:10.47467/reslaj.v4i2.798.

Foucault, M, *The History of Sexuality*, Vol. I: An Introduction. Terj. Robert Hurley. (New York: Vintage Books, 1990) 82-83.

Haedar Nashir, *Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Ideologis*, (Jakarta: PSAP. 1993),

Heki Hartono, "Relasi Kuasa Dalam Penafsiran Jihad Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019)

Iffaty Zamimah, "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab," *Jurnal Al-Fanar* 1, no. 1 (2018): 75–90
<https://doi.org/10.33511/alfanar.v1n1.75-90>

Islah Gusmian, *Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, (IAIN Surakarta: Al-A'raf, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 2015), Vol.xxi, No.2, h.2
<https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i2.1173>

_____, *Tafsir Alquran dan Kekuasaan di Indonesia, Peneguhan, Kontestasi dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: Salwa, 2014), 7.

Jamarudin, Ade, Miftah Ulya, Rois Abdul Fatah, and Wage Wage. "Implementing Religious Moderation Using the Perspective of the Qur'an". *KnE Social Sciences*, Vol. 7, No. 8, April 2022, 579-90. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i8.10776>

Johanna Pink. "*Tradition, Authority, and Innovation in Contemporary Sunni Tafsir: Towards a Typology of Qur'an Commentaries from the Arab World, Indonesia and Turkey*" dalam *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 12 (2010), 5961.

Karl Mannheim, *Ideology and Utopia, an Introduction to the Sociology of Knowledge* (London: Routledge & Kegan Paul Ltd. 39, t.th).

- Kurniawan, Arif. "Tinjauan Strategi Wacana Kuasa Pemerintah dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI." *HERMENEUTIK* [Online], 13.2 (2019): 35-63. DOI: [10.21043/hermeneutik.v13i2.6353](https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v13i2.6353)
- Lajnah Pentashih Mushaf Alquran, *Mukadimah Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008)
- M. Arfan Mu'ammar, *Hermenutika Khaleed Abou El-Fadhl* (Yogyakarta: IRCSiD, 2017), h.158
- Markaz Tafsir li ad Dirasat al Quraniyyah, *Mausuah at Tafsir al Maudhu'I li al Qur'an al Karim*, (Riyadh: 2019)
- Moch. Mahrus, *Moderasi Beragama Dalam Kajian Tafsir Kementerian Agama Ri Tahun 2000*, (Semarang: UIN Walisongo, 2021)
- Mohammad Atho Mudzhar, *Islam in a Globalized World: The Challenges of Human Rights, Law, and Interfaith Harmony* (Jakarta: Badang Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2011).
- Muhammad Izzul Haq Zain dan Muhammad Imam Mutaqin "Membela Sistem Nasional; Analisis Wacana Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik) Kementerian Agama Republik Indonesia" An-Nida' Vol 46, No 2 (2022), <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20862>
- Muhammad Izzul Haq Zain, Muhammad Imam Mutaqin, *Membela Sistem Nasional; Analisis Wacana Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik) Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jurnal An-Nida, Vol 46, No 2 (2022), DOI: 10.24014/an-nida.v46i2.20862
- Muhammad Khairan Arif, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha," AlRisalah 11, no. 1 (2020): 22–43. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>
- Munandar, S. A., and S. Amin. "Contemporary Interpretation Of Religious Moderation In The Qur'an: Thought Analysis Quraish Shihab And Its Relevance In The Indonesian Context". *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, vol. 2, no. 3, Aug. 2023, pp. 290-09, doi:10.23917/qist.v2i3.1448.
- Munandar, Siswoyo Aris, and Saifuddin Amin. "Contemporary Interpretation Of Religious Moderation In The Qur'an: Thought Analysis Quraish Shihab And Its Relevance In The Indonesian Context". *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* vol. 2, No. 3 Agustus 2023, hlm. 290-09. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.1448>.
- Naili Rosa, "Orientasi Penyusunan dan Wacara Kritis terhadap Tafsir Qur'an Tematik (TQT) Moderasi Beragama Kementerian Agama", *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara* DOI: 10.32495/nun.v8i2.412 Vol. 8 No. 2 (2022)
- Purwanto, Tinggal, *Kesetaraan Gender Dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jurnal PALASTREN, Vol. 12, No. 1, Juni 2019, 30-63
- Salim, AA, dan AK Riyadi. "Tawāṣuṭ, 'Adālah, Dan Tawāzun Dalam Penafsiran Kementerian Agama: Telaah Konsep Moderasi Beragama Negara". *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* , vol. 8, no. 1 Mei 2022, hlm. 45-72, doi:10.32495/nun.v8i1.345.
- Shihab, M. Quraish, Wasathiyah: *Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2020)
- Suci Wulandari, "IDEOLOGI 'KANCA WINGKING': STUDI RELASI KUASA PENGETAHUAN DALAM TAFSIR ALHUDA," *Al-A'rāf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 15, no. 1 (June 30, 2018): 101, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1210>.

Sutrisno, A., M. R. Haqiqi, B. M. Roza, and M. M. Dalail. “Qur’anic Insights On Religious Moderation And Its Relevance To Religious Harmony In Indonesia”. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, vol. 2, no. 1, Feb. 2023, pp. 102-15, doi:10.23917/qist.v2i1.1470.

Taryudi Taryudi and Tatan Setiawan, “Tafsir dan Politik Kekuasaan di Indonesia”. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 1, No 1, 2021, pp. 63-70 <http://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11483>

Ulinnuha, M., and M. Nafisah. “MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF HASBI ASH-SHIDDIEQY, HAMKA, DAN QURAISH SHIHAB”. *SUHUF*, Vol. 13, no. 1, June 2020, pp. 55-76, doi:10.22548/shf.v13i1.519.

Ulya, Hubungan Kekuasaan – Pengetahuan dalam Pewacanaan Ulu al-Amr QS an-Nisa [4]:59 pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955-1966 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 330-339

https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_13-04-2023_6437ba3889fa4.pdf,

<https://pustakalajnah.kemenag.go.id/>